KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kebut Selesaikan 5 RUU, Bamsoet Minta menteri Rajin Datang Ke DPR
Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Kebut Selesaikan 5 RUU

Bamsoet Minta Menteri Rajin Datang Ke DPR

KETUA DPR Bambang Soesatyo menegaskan, sisa waktu masa jabatan anggota DPR yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak membuat semangat dan kinerja DPR mengendor. Seluruh fraksi di DPR telah bersepakat untuk fokus menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas.

"DPR terus berkoordinasi dengan pemerintah agar dalam sisa masa waktu jabatan yang akan berakhir pada bulan September 2019, dapat secara maksimal menyelesaikan RUU yang masuk prioritas. Pimpinan dewan juga terus melakukan rapat konsultasi dalam rangka akselerasi penyelesaian RUU dengan Pimpinan AKD dan Pansus yang menangani RUU," ujar Bamsoet usai bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yosona Laoly di ruang kerja Ketua DPR yang kemudian dilanjutkan rapat konsultasi pimpinan dengan para ketua pansus dan panja RUU dan ketua-ketua Komisi di ruang rapat pimpinan DPR di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Ketua DPR Utut Hadiyanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, para pimpinan Komisi.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengungkapkan, hingga Masa Sidang V DPR yang akan berakhir pada tanggal 25 Juli 2019, setidaknya ada lima RUU diharapkan bisa disahkan. Lima RUU tersebut yaitu RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Jabatan Hakim, RUU Pemasyarakatan, RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU Ekonomi Kreatif.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi DPR I, pimpinan Pansus DPR dan Pimpinan Legislasi DPR, kita optimistis lima RUU tersebut bisa diselesaikan pada masa sidang ini. Pada masa sidang berikutnya yang akan dimulai bulan Agustus hingga September 2019, diharapkan ada empat RUU lagi yang bisa diselesaikan, yakni RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, RUU Perkoperasian, serta RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi," urai Bamsoet.

Secara khusus legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kebumen, dan Banjarnegara ini sangat berharap RUU KUHP bisa diselesaikan pada masa sidang ini. Sehingga, bisa menjadi kado terindah saat HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus mendatang.

"DPR dan pemerintah memandang urgent menyelesaikan RUU KUHP karena sampai saat ini kita masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda. Jika saja DPR dan pemerintah dapat merampungkan pembahasan RUU KUHP tersebut akan menjadi 'legacy', sekaligus hadiah terindah dalam rangka peringatan HUT Ke-74 Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2019," tutur Bamsoet.

Lebih jauh Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya terletak di tangan DPR saja. ■ KAL